



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 25
<b>Jenis Rapat</b>	: <b>Rapat Kerja</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Senin, 1 Juli 2019</b>
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Efektifitas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019
Ketua Rapat	: <b>H. Iskan Qolba Lubis, M.A.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 30 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Kepala Badan Pelaksana BPKH 4. Ketua Dewan Pengawas BPKH

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Ketua Komisi VIII, H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Komisi VIII menerima Laporan Pembahasan dan Persetujuan Detail Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2019 sesuai Butir 3 Kesimpulan RDP tanggal 28 Maret 2019 yang diserahkan oleh

Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M Ali Taher Parasong, S.H., M.Hum

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas "**Efektifitas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh BPKH dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2018 dan sertifikasi ISO 9001:2015.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung BPKH mengajukan usulan pengecualian pajak dengan tujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan haji.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong untuk mengamandemen UU No. 34 Tahun 2014 yang berkaitan dengan BPKH karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum, dengan terlebih dahulu melakukan FGD dengan berbagai pihak.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH agar dalam pengelolaan RKAT 2019, dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Melakukan harmonisasi hubungan kelembagaan dengan *stakeholder* terkait.
  - b. BPKH segera membuat kajian rasionalitas BPIH untuk mendapatkan persetujuan DPR RI

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.23 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**